

POHON KINERJA KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

CAMAT



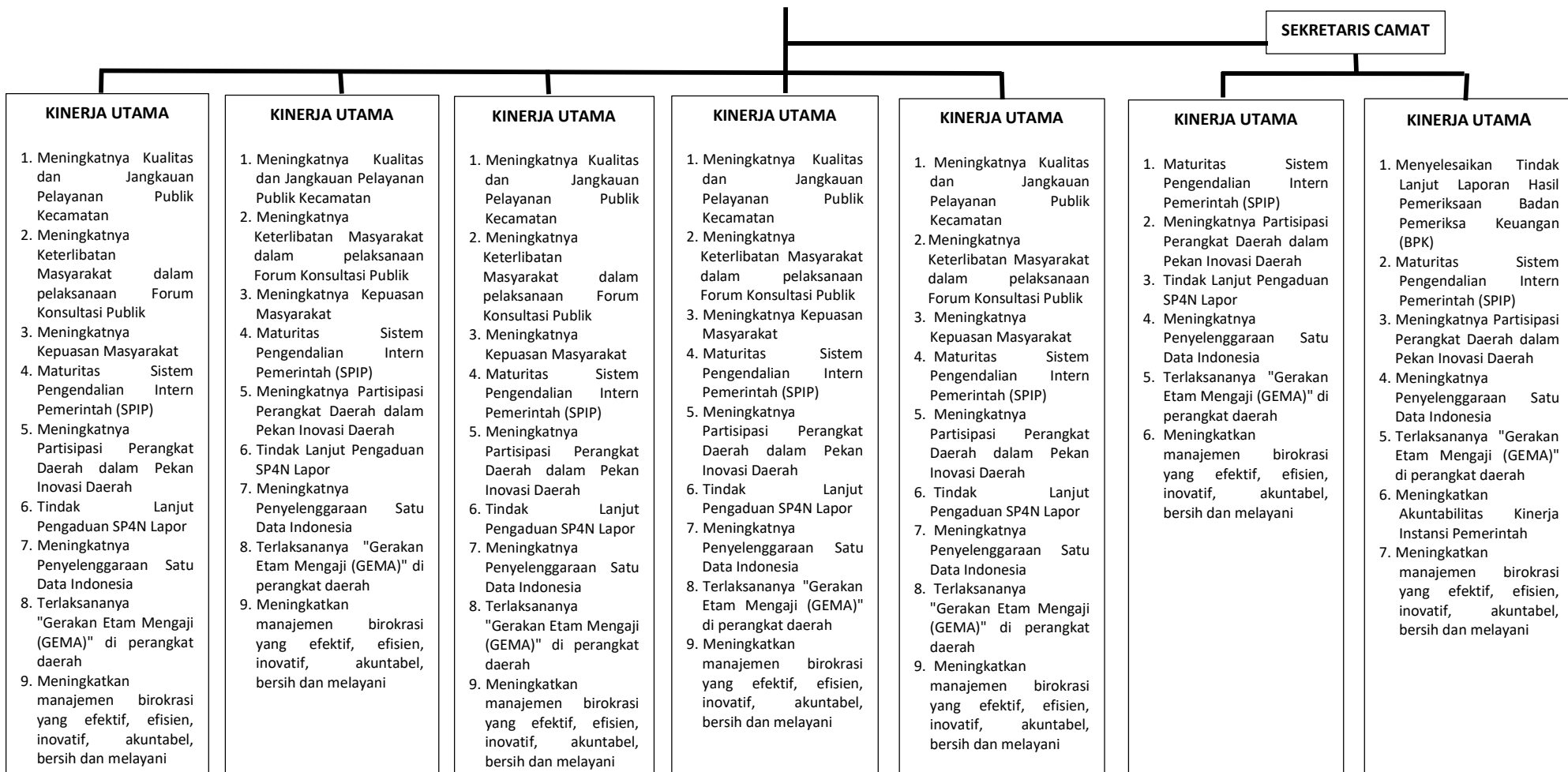
SASARAN

1. **Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan**
2. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Meningkatkan Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah
7. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
8. Meningkatkan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
9. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah
10. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani



INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
2. Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum
3. Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya
6. Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah
7. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah
8. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
9. Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia
10. Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
11. Nilai SAKIP Kabupaten
12. Indeks RB Kabupaten



INDIKATOR KINERJA - Persentase Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti - Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah - Jumlah Inovasi Perangkat Daerah - Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor - Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia - Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" - Indeks RB Kabupaten	INDIKATOR KINERJA - Persentase Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti - Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah - Jumlah Inovasi Perangkat Daerah - Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor - Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia - Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" - Indeks RB Kabupaten	INDIKATOR KINERJA - Persentase Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti - Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah - Jumlah Inovasi Perangkat Daerah - Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor - Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia - Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" - Indeks RB Kabupaten	INDIKATOR KINERJA - Persentase Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti - Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah - Jumlah Inovasi Perangkat Daerah - Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor - Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia - Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" - Indeks RB Kabupaten	INDIKATOR KINERJA - Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum - Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah - Jumlah Inovasi Perangkat Daerah - Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor - Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia - Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" - Indeks RB Kabupaten	INDIKATOR KINERJA - Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah - Jumlah Inovasi Perangkat Daerah - Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor - Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia - Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" - Indeks RB Kabupaten	INDIKATOR KINERJA - Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya - Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah - Jumlah Inovasi Perangkat Daerah - Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia - Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" - Nilai SAKIP Kabupaten - Indeks RB Kabupaten
PROGRAM Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM - Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN 1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SUB KEGIATAN 1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SUB KEGIATAN 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkkan	SUB KEGIATAN 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	SUB KEGIATAN 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	SUB KEGIATAN 1. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 13. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 14. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 15. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SUB KEGIATAN 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 11. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
--	---	---	--	--	---	---

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
KASI PEMERINTAHAN	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KASI PELAYANAN UMUM	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	KASUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan	KINERJA UTAMA 1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya Kualitas administrasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 2. Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	KINERJA UTAMA 1. Pelaksanaan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	KINERJA UTAMA 1. Terlaksananya Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah 2. Meningkatnya Koordinasi dengan Instansi Vertikal, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KINERJA UTAMA 1. Tersedianya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Kantor 2. Peningkatan Kualitas ASN Kecamatan 3. Terlaksananya Implementasi Inovasi 4. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan
INDIKATOR KINERJA 1. Persentase Pemerintahan Umum yang terlayani 2. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang difasilitasi	INDIKATOR KINERJA 1. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2. Realisasi Laporan Hasil Pengendalian DTKS 3. Prevalensi Penurunan Stunting	INDIKATOR KINERJA 1. Realisasi terisi data dan informasi Pembangunan 2. Terbangunnya Infrastruktur 3. Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri 4. Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	INDIKATOR KINERJA 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Terselenggaranya pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum	INDIKATOR KINERJA 1. Terlaksananya Pemantauan, koordinasi dan pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Wilayah yang dilaksanakan 2. Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	INDIKATOR KINERJA 1. Realisasi Pemenuhan Sarana dan Kebutuhan Kantor 2. Meningkatnya Kapasitas ASN Kecamatan 3. Realisasi Implementasi Inovasi 4. Terkelolanya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	INDIKATOR KINERJA 1. Nilai AKIP 2. Realisasi Laporan Kegiatan Keuangan, Perencanaan dan Kinerja Kecamatan, SPIP dan Laporan Pengelolaan Resiko



Loa Janan, 07 Februari 2025

CAMAT,

DR. HERY RUSNADI

NIP. 19721213 199201 1 001